



Bayar Parkir Pakai QRIS

► Cegah Kebocoran

SURABAYA, SURYA - Retribusi parkir menjadi salah satu andalan Pemkot Surabaya dalam menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) di 2024. Untuk mengoptimalkannya, Pemkot Surabaya mulai memberlakukan parkir berlangganan dan pembayaran melalui non-tunai (QRIS).

Dinas Perhubungan (Dishub) telah mendaftarkan masing-masing titik lokasi parkir. Masing-masing lokasi akan dilengkapi dengan papan QR code yang akan memberikan fasilitas pembayaran secara elektronik.

"Ada dua pilihan, parkir berlangganan atau semua titik parkir itu adalah menggunakan QRIS, tidak lagi menggunakan manual," kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Selasa (9/1).

Program tersebut akan memberikan jaminan kerja sama bagi hasil antara juru parkir (jukir) dengan Pemkot Surabaya. Ia mencontohkan, masing-masing jukir bisa mendapatkan 40 persen dari total pendapatan.

Dari tiap pembayaran oleh pelanggan, pembagian hasil akan langsung masuk ke rekening jukir di lokasi tersebut. Pun demikian dengan pendapatan 60 persen juga langsung masuk ke pemerintah.

"Jadi hasilnya (pendapatan retribusi) berapa, kalau jukirnya 40 persen, langsung masuk ke jukir 40 persen, dan masuk ke pemerintah-



SURYA/BOBBY KOLOWAY

PARKIR NONTUNAI - Pemkot Surabaya mulai memberlakukan parkir berlangganan dan pembayaran parkir melalui non-tunai (QRIS).

nya 60 persen. Itu lebih fair, lebih adil," tandasnya.

Wali Kota Eri meyakini, melalui mekanisme pembayaran seperti ini maka akan dapat mencegah kebocoran PAD dari retribusi parkir. Lebih dari itu, pola ini juga diharapkan membendung adanya oknum petugas Dishub yang bermain dengan retribusi parkir.

Misalnya, dugaan pegawai Dishub yang menyisihkan sebagian rupiah dari retribusi tersebut. "Kalau selama ini jukir mengatakan bahwa *wong Dishub kakean dulinan* (orang

Dishub kebanyakan bermain), nah dengan QRIS ini insya Allah akan memberikan kepastian dengan parkir berlangganan antara jukir dengan teman-teman Dishub," tegasnya.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga melakukan pemeriksaan PAD Surabaya. Hasil rekomendasi BPK adalah semua restoran atau tempat makan di Surabaya harus menyediakan *tapping* atau alat pembayaran untuk parkir.

"Jadi secara otomatis pembayarannya lewat itu, tidak ada lagi gedog (membayar) manual. Dari situ

kita nanti bisa lihat, berapa tapping yang masuk. Jadi semua tempat-tempat yang menghasilkan PAD, tidak ada lagi pendapatan dilakukan secara manual," tegasnya.

Jukir juga tidak boleh menarik retribusi parkir di atas ketentuan. Hal ini sebagaimana telah menjadi komitmen dalam kontrak kinerja Kepala Dishub Surabaya dan jajarannya.

"Mulai Februari 2024 tidak ada lagi, karena itu kontrak kerjanya Dishub. Kalau tidak bisa, Kadishubnya (Kepala Dishub) dicopot," tandasnya. **(bob)**